

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA  
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN CV. HIDAYAHKU**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**SAFIRA NUR ROSYIDA  
C100182165**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA  
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN CV. HIDAYAHKU**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**SAFIRA NUR ROSYIDA**

**C100182165**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Nuswardhani, S.H., S.U.**




**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA  
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN CV HIDAYAHKU**

**OLEH  
SAFIRA NUR ROSYIDA  
C100182165**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Senin, 15 November 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Nuswardhani, S.H., S.U. (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Shallman, S.E., S.H., M.Kn (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

  
**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 00261226801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 November 2021

Penulis



**SAFIRA NUR ROSYIDA**  
**C100182165**

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN CV. HIDAYAHKU**

### **Abstrak**

Pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku menyangkut dua pihak diantaranya klien dan notaris maka disebut perjanjian timbal balik oleh karenanya menimbulkan hak serta kewajiban antara klien dan notaris. Jika dalam melaksanakan hak dan kewajiban salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka menimbulkan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku, peraturan serta hak dan kewajiban antara notaris dengan klien, dan tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu dengan meneliti kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dan klien dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan secara jelas perihal tanggung jawab hukum antara notaris dan klien dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses pelaksanaan perjanjian pembuatan akta pendirian CV meliputi : (1) Sebelum terjadinya perjanjian notaris dan klien harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, (2) Saat terjadinya perjanjian yang ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan pembuatan akta pendirian CV yang telah dibuat oleh notaris berdasarkan perjanjian baku, (3) Setelah kesepakatan terjadi timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dan dalam melakukan hak dan kewajiban kedua belah pihak harus mentaati peraturan-peraturan dalam akta pendirian yang berlaku. Jika kewajiban tidak terpenuhi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, sedangkan apabila salah satu pihak melanggar peraturan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci :** Pembuatan akta pendirian CV, hubungan hukum antara CV. Hidayahku dengan notaris, tanggung jawab hukum.

### **Abstract**

The making of the deed of establishment of CV. Hidayahku involves two parties including the client and the notary, so it is called a reciprocal agreement and therefore creates rights and obligations between the client and the notary. If in carrying out the rights and obligations of one of the parties does not fulfill the performance, then legal responsibility arises. The purpose of this study was to determine the implementation process of making the deed of establishment of CV. Hidayahku, the rules and rights and obligations between a notary and the client, and legal responsibility for defaults or acts against the law. This study uses a normative approach, namely by examining legal rules and legal principles relating to the responsibilities of the notary and the client in making the deed of establishment of CV. Hidayahku. The type of research used in this research is descriptive research by clearly describing the date of legal responsibility between the notary and the client in making the deed of establishment of CV. Hidayahku. The results of this study indicate that in the process of implementing the agreement to make a deed of incorporation, the CV includes: (1) Before the notary agreement and the client must meet administrative and legal requirements, (2) when the agreement occurs, which is marked by an agreement to make a deed of establishment CV which has been by a notary based on a standard agreement, (3) After an agreement occurs, a legal relationship arises

in the form of rights and obligations that bind the parties and in carrying out the rights and obligations both parties must comply with the regulations in the applicable deed of establishment. If the obligation is not fulfilled, it can be accounted for based on default, while if one of the parties violates it can be required on the basis of being against the law.

**Keywords:** Making a deed of establishment of CV, legal relationship between CV. Hidayahku and a notary, legal responsibility.

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak perusahaan baru bermunculan baik perusahaan milik negara maupun milik swasta. Dalam mendirikan suatu perusahaan harus memiliki akta pendirian berupa akta otentik sebelum dapat didaftarkan kepada pemerintah. Untuk membuat akta pendirian perusahaan dimiliki oleh pejabat tertentu yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta otentik dengan tujuan untuk memberikan kekuatan serta pengesahan, penetapan dan memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta.

Pembuatan akta oleh notaris berasal dari pemberian wewenang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana akta tersebut dapat berupa Commanditaire Vennostchap (CV). Akta yang telah dibuat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tujuan jika pada suatu hari terjadi perselisihan diantara keduanya yang menimbulkan gugatan dari salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam pembuatan akta pendirian CV, yang dapat didaftarkan kedalam Administrasi Hukum Online (AHU) online sebagai CV berbadan hukum dalam bidang usahanya dibagi menjadi lima sektor, meliputi jasa, perdagangan, percetakan, industri, dan kontraktor. CV. Hidayahku merupakan CV yang bergerak dalam bidang jasa dengan lingkup kegiatan penyedia jasa kebersihan dalam pembuatan atau pengeboran sumur air tanah dan pemasangan bangunan prafabrikasi yang biasa dikerjakan atas dasar subkontrak. Sebelum mengoperasikan bidangnya, para pihak yang terlibat dalam pendirian CV telah melakukan perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata.

Menurut perspektif Islam, istilah perikatan dalam Islam disebut akad, artinya ada suatu perikatan bersama secara tulisan, lisan, maupun isyarat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi pihak

yang melakukan perikatan. Dasar perikatan dalam Islam terdapat dalam Qs. Al Ma'idah ayat 1 dan Qs. An-Nisaa ayat 29, dijelaskan bahwa dalam melakukan perniagaan berlaku suka sama suka dan harus memenuhi akad-akad itu.

Oleh karena CV. Hidayahku adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa, maka membutuhkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini muncul hubungan hukum antara notaris dan klien berupa hak dan kewajiban dalam pembuatan akta pendirian CV. Apabila dalam pembuatan akta notaris ataupun klien terjadi kesalahan karena melanggar kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan atas dasar wanprestasi dan jika ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan berupa melanggar peraturan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pelaksanaan pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku yang dibuat oleh Notaris dengan kliennya? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Notaris dengan klien dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku? (3) Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika antara Notaris dengan klien melakukan kesalahan dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku?

## **2. METODE**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, karena yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas perihal tanggung jawab hukum notaris terhadap kliennya dalam pembuatan akta pendirian CV.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder dengan menggunakan bahan penelitian hukum sebagai berikut : a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Akta Pendirian CV. Hidayahku. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b) Penelitian Lapangan untuk

mendapatkan data primer dalam hal ini meliputi lokasi penelitian Kantor Notaris Siska Diah Purwanti, S.H., M.Kn., Subyek dalam penelitian ini adalah notaris yang berhubungan dengan kliennya dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. Data sekunder dipadukan dengan data primer kemudian data dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siska Diah Purwanti selaku notaris di Kantor Notaris Siska Diah Purwanti, S.H., M.Kn., terdapat beberapa proses dalam pembuatan akta pendirian CV. Pelaksanaan pembuatan akta pendirian CV dilaksanakan berdasarkan proses-proses yang telah ditentukan oleh notaris.

Sebelum terjadi kesepakatan dalam proses pembuatan akta pendirian CV yang dilakukan antara notaris dengan klien harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, yaitu : Syarat administrasi meliputi klien wajib memberikan semua informasi mengenai identitas dirinya secara lengkap; Klien wajib kewajiban untuk memberikan keterangan secara jelas perihal posisinya didepan notaris sebagai pihak penghadap; Klien harus memberikan penjelasan tentang kejadian yang dialami secara rinci; Klien diwajibkan berhadapan langsung dengan notaris dan tidak boleh diwakilkan orang lain kecuali klien memiliki kuasa hukum khusus; Perihal pembuatan akta pendirian CV, klien diwajibkan memberikan informasi dengan jelas mengenai CV yang akan dibuatkan akta tersebut serta informasi mengenai kelengkapan syarat-syarat pendirian CV secara jelas dan lengkap; Klien wajib menyediakan lima nama CV yang akan didirikan supaya tidak mempunyai kesamaan nama seperti CV lain. Jika semua persyaratan telah memenuhi syarat serta dinyatakan telah lengkap dan jelas kemudian sebelum notaris membuat akta pendirian CV wajib melihat terlebih dahulu KBLI tiga tahun kebelakang agar mengetahui kode angka serta struktur bidang CV dengan struktur bidang usaha yang diinginkan klien. Jika struktur bidang CV disepakati oleh notaris dan klien, selanjutnya notaris akan membuatkan aktanya. Syarat Hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.



Saat terjadinya kesepakatan antara notaris dan klien jika klien menyatakan sepakat mengenai syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan terjadi waktu notaris dan klien sepakat perihal syarat, hak serta kewajiban para pihak, dan disesuaikan dengan apa yang sudah termuat dalam perjanjian berlaku bagi kedua belah pihak dengan cara menjaga kepercayaan yang diberikan yang diberikan oleh notaris dengan klien serta telah menerapkan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Setelah terjadi kesepakatan antara notaris dengan klien yang ditadai dengan adanya tanda tangan dan cap jempol pada surat perjanjian, maka timbul hubungan hukum antara notaris dan klien berupa hak dan kewajiban.

Peraturan yang berlaku dalam pembuatan akta pendirian CV Hidayahku antara klien dengan notaris menggunakan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Syarat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian pembuatan akta pendirian CV menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 poin 7, 16, dan 18. Hubungan hukum antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban serta timbul tanggung jawab hukum antara notaris dengan klien. Pengaturan mengenai hak notaris diatur dalam pasal 25, pasal 36, dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perihal kewajiban notaris diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 dan pasal 16 huruf a UU No. 2 Tahun 2014, Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dapat dituntut dengan mengganti kerugian atas dasar pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi dan atau berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Hak notaris : (1) Notaris berhak memeriksa dan memastikan kebenaran tentang isi akta yang akan dimuat dalam akta; (2) Notaris berhak menerima honorarium karena notaris sebagai pihak pelayanan jasa pembuatan akta pendirian CV; (3) Notaris saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, notaris berhak melakukan pembelaan diri dalam pemeriksaan sidang yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban notaris : (1) Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam pembuatan akta pendirian CV; (2) Notaris berkewajiban bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak serta menjaga kepentingan para

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (3) Notaris memiliki kewajiban untuk membuat dan menuangkan keinginan dari klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien; (5) Notaris wajib memeriksa kelengkapan berkas-berkas pembuatan akta pendirian CV.

Hak Klien : (1) Klien berhak menerima akta yang dibuat oleh notaris; (2) Klien berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan secara luas perihal akta pendirian CV; (3) Klien berhak mendapat pelayanan secara maksimal berupa pembuatan akta pendirian sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Kewajiban Klien : (1) Klien diwajibkan memberikan keterangan secara lengkap, jelas, dan jujur terkait dengan isi yang akan dimuat dalam akta pendirian; (2) Klien berkewajiban memberikan rasa kepercayaan secara sepenuhnya kepada notaris, agar notaris memberikan pelayanan berupa jasa secara maksimal sehingga kepentingan klien menjadi hal yang diprioritaskan notaris; (3) Klien wajib untuk memastikan kebenaran dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta pendirian; (4) Klien berkewajiban memberikan honorarium atau uang jasa kepada notaris.

Jika terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak, klien dan notaris akan menyelesaikan dengan cara perdamaian melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Tanggung jawab hukum timbul ketika salah satu pihak mengajukan permasalahan melalui pengadilan. Namun sejauh ini notaris dan klien belum pernah mengajukan permasalahan melalui jalur pengadilan.

Dalam melaksanakan perjanjian antara notaris dengan klien dapat terjadi wanprestasi akibat salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, Pembebanan tanggung jawab yang diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan atas pasal 1243 KUHPerdara wajib memberikan ganti kerugian sebagai wujud tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh klien adalah ketika belum membayar biaya sepenuhnya pembuatan akta pendirian CV dimana biaya tersebut sudah tercantum dalam perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika penyelesaian dengan mediasi tidak tercapai, notaris meminta perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang akan wanprestasi yang telah dilakukan

oleh kliennya karena tidak sanggup untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran dalam pembuatan akta yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika klien terbukti melakukan atau belum membayar sepenuhnya pembayaran maka klien wajib bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak notaris sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami notaris tersebut.

Contoh wanprestasi yang dilakukan oleh notaris adalah dalam proses pembuatan akta pendirian CV ntotaris tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang telah disepakati serta notaris susah diketahui keberadaannya, maka klien yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi karena notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika notaris dinyatakan bersalah, maka notaris wajib mengganti kerugian sesuai dengan putusan pengadilan.

Selain wanprestasi kesalahan dapat juga dalam perbuatan melawan hukum. Dalam pembuatan akta pendirian CV, notaris berusaha melaksanakan kewajibannya untuk membuat akta secara hati-hati serta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Contohnya keterlibatan notaris melakukan kesalahan dalam membuat isi yang tidak sesuai dengan peristiwa dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak lain tidak mempercayai isi akta pendirian CV karena terdapat keganjalan dengan isi akta dimana tidak sesuai dengan maksud dan tujuan CV ini dibentuk. Isi dari suatu akta dapat disangkal oleh pihak lain karena pada saat akta pendirian telah diterima oleh CV. Hidayahku dan CV tersebut telah melakukan perjanjian dengan kliennya. Namun pihak lain yang menyangkal isi akta tersebut harus bisa membuktikan bahwa isi akta CV Hidayahku bergerak dalam bidang penyedia jasa konstruksi bangunan sipil secara umum. Penyangkalan dapat terjadi jika pihak yang menyangkal tersebut mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri. Jika pihak penyangkal bisa membuktikan gugatannya maka pihak CV dianggap kalah dan notaris ikut serta menjadi tergugat karena membuat akta tersebut tidak memberikan kelengkapan secara spesifik terkait CV. Hidayahku.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika pihak lain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan isi gugatan bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak memberikan kelengkapan

secara spesifik perihal CV. Hidayahku, dimana karena kesalahannya itu mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dan telah melanggar peraturan hukum serta tidak melakukan kehati-hatian dalam pembuatan akta. Dari dasar itu, klien mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri dan jika dalam proses pemeriksaan perkara notaris terbukti bersalah, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mengganti kerugian sesuai dengan putusan hakim.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dalam proses pembuatan akta pendirian CV dapat dilakukan dengan tiga tahap yang meliputi :

*Pertama*, sebelum terjadi kesepakatan antara klien dengan notaris harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang meliputi : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Saat terjadinya kesepakatan antara klien dan notaris jika klien menyatakan sepakat perihal syarat serta ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan terjadi saat klien dan notaris menandatangani perjanjian pembuatan akta pendirian CV. Dari penandatanganan surat perjanjian tersebut, terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu notaris dan klien yang kemudian menimbulkan hubungan hukum yaitu hak antara notaris dengan klien dalam melakukan hak dan kewajiban menaati peraturan-peraturan dalam pembuatan akta pendirian CV.

*Kedua*, peraturan serta hak dan kewajiban dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku antara notaris dengan klien. Peraturan yang mengatur perihal notaris berwenang dalam membuat suatu akta otentik diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana didalamnya berhak membuat akta pendirian CV. Syarat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga timbul kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian pembuatan akta pendirian CV menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 poin 7, 16, dan 18. Hak notaris diatur dalam pasal 25, pasal 36, dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perihal kewajiban

notaris diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 dan pasal 16 huruf a UU No. 2 Tahun 2014. Hak klien meliputi berhak menerima akta yang dibuat oleh notaris, berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan secara luas perihal akta pendirian CV, mendapatkan pelayanan maksimal dalam proses pembuatan akta sesuai dengan yang dikehendaki. Kewajiban klien meliputi memberi keterangan secara rinci perihal isi yang dimuat dalam akta, memberikan rasa kepercayaan sepenuhnya terhadap notaris, berkewajiban memastikan kebenaran serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta, serta memberi uang jasa kepada notaris. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dapat dituntut dengan mengganti kerugian atas dasar pasal 1243 KUHPdata tentang wanprestasi dan atau berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum.

*Ketiga*, jika dalam pembuatan perjanjian akta pendirian CV salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan atas dasar wanprestasi, dan jika ada salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku dalam pembuatan akta pendirian CV maka dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi masyarakat hendaknya untuk dimengerti serta dimahami apabila terjadi suatu permasalahan dalam pembuatan akta pendirian CV dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi terlebih dahulu. Namun jika musyawarah atau mediasi tidak mencapai suatu hasil, dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

*Kedua*, bagi klien hendaknya sebelum melaksanakan perjanjian pembuatan akta pendirian CV, klien dapat membaca dan memahami secara rinci perihal syarat dan isi pedoman dalam pembuatan akta pendirian CV dikarenakan saat terjadi kesepakatan antara notaris dengan klien timbul hak dan kewajiban diantara keduanya, yang mengakibatkan klien harus memenuhi dan dan kewajibannya. Apabila klien melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi dan atau atas dasar perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh klien.

*Ketiga*, bagi notaris selaku penyedia jasa dalam pembuatan akta pendirian CV diharapkan menjaga kualitas dalam memberikan jasa pelayanan khususnya perihal menuangkan isi akta sesuai kehendak klien serta harus menerapkan sikap kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta sehingga akta yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan klien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustan, Leni dan Khairulnas. 2018. *Tata Kelola Kantor Notariss/PPAT*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewe, Gemala: Wirdyaningsih: Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Cimanggis: Prenadamedia Group.
- Faizin, Mu'adil. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans. (alih Bahasa oleh Somardi), 2007. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Koesmoewati, Ira. dkk. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Koesasih, Johannes Ibrahim dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2019. *Problematika Hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis Dan Perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Madkur, Muhammad Salam. 1963. *al-adkhal al-fih al-Islamiyy*. ttp: Daral-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Meliala, Djaja.S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Edisi Revisi Keenam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- S, Salim H. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abadin.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, Cerakan XVI

Suberkti, dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-32.

Widjaja, I.G. Rai. 2005. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha)*. Bekasi: Kesain Blanc.

Widjaja, I.G. Rai. 2020. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesait Blanc.

## **Jurnal**

Intradewi, Sagung Ngurah dan Gede, Anak Agung KOMPIANG. 2021. Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No. 1. 2021*.

Kamagi, Gita Anggreina. 2018. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum, Vol. 6 No. 5. 2018*.

Lengkong, Mario Randy. 2017. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu. *Lex Administratum, Vol. 5 No. 2. 2017*.

Muftadin, Darul. 2018. Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Al-'Adl, Vol 11 No. 1. 2018*.

Ratnawati, Ayu. 2015. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium, Vol. 2 No. 2. 2015*.

Saptini, Endah. 2015. Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan. *Jurnal Repertorium, Vol. 2 No. 2. 2015*.

Sari, Novi Ratna. 2017. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium, Vol 4 No. 2. 2017*.

T, Rahmadi Indra. dkk. 2020. Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018. *Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 2. 2020*.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia

*Herzien Inlandch Reglement (HIR)*

### **Internet**

<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/comanditaire-venootschap-cv/> . diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 20:40 WIB.

<https://kbli.officenow.co.id/> . diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 20:36 WIB.

<https://litequran.net/al-maidah> . Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 07:00 WIB.

### **Wawancara**

Purwanti, Siska Diah, Notaris di Kantor Siska Diah Purwanti di Kabupaten Cilacap, Wawancara Pribadi, Pukul 13.30 WIB.